

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.2 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai Prosedur Penatausahaan keuangan daerah pada bendahara pengeluaran kantor walikota Padang panjang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penginputan data-data untuk SPP, panjar, BKU, BPK, SPJ,SPM ke dalam sistem sudah sesuai dengan panduan SIPKD
2. Prosedur penatausahaan yang berlangsung pada kantor walikota Padang panjang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017.
3. Prosedur penatausahaan yang dilakukan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bidang-bidang di dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sudah berjalan optimal.
4. Dokumen SPJ yang kurang lengkap mengharuskan pengembalian SPJ ke pada masing-masing bidang agar di lengkapi terlebih dahulu yang akan berdampak pada molornya penerbitan SPM yang akan diserahkan ke BKUD. Penyerahan SPM di BKUD berguna sebagai pencairan dana atas kegiatan yang telah dilakukan. Pencairan dana ke BKUD bersifat sebagai pengisian kembali atas dana yang ada pada kantor walikota Padang panjang. Jika penyerahan SPM semakin mundur, maka dana yang ada

pada kantor walikota Padang panjang akan semakin menipis dan dikhawatirkan tidak bisa memberi pendanaan bagi bidang-bidang lainnya yang membutuhkan pendanaan untuk memulai kegiatannya

5. SIPKD yang ada pada kantor walikota Padang panjang sangat membantu pekerjaan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk memproses pencatatan kegiatan yang membutuhkan pendanaan, mencatat adanya transaksi keluar dan perincian keperluan anggaran.

## 5.2 Saran

1. Ditambahkan tim verifikator pada kantor walikota Padang panjang untuk pengecekan dokumen SPJ.
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada kantor walikota Padang panjang untuk kedepannya diharapkan dapat lebih dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
3. Diadakan kembali pelatihan kepada pegawai kantor walikota Padang panjang agar dapat lebih mengoptimalkan kembali penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah